

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menjadi negara demokrasi. Soekarno, Hatta, dan Sjahrir adalah beberapa pendiri yang menciptakan model demokrasi yang berbeda. Awalnya, terdapat percobaan menerapkan Demokrasi Liberal (Parlemen) yang bersumber dari negara-negara Barat. Bung Karno, di sisi lain, memilih strategi berbeda yang disebut sebagai Demokrasi Terpimpin. Era Orde Baru setelahnya mencari pengganti yang dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi meliputi hak yang sama untuk semua individu, kebebasan dan kebebasan yang diakui atau dilindungi, keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, sistem perwakilan yang efisien, dan prosedur pemilu yang menjunjung tinggi gagasan pemerintahan mayoritas. Pancasila disambut baik di Indonesia Demokrasi adalah jenis pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan warganya dan didasarkan pada gagasan kekerabatan dan gotong royong. Ini menggabungkan aspek kesadaran agama, penghormatan terhadap kebenaran, kejujuran moral, dan patriotisme. Pancasila Sesuai dengan UUD 1945, demokrasi adalah jenis pemerintahan konstitusional yang menjunjung tinggi mekanisme kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan (Erita & Kunci, 2022).

Semua warga negara memiliki akses ke keadilan dan kesetaraan di bawah sistem politik yang demokratis, itulah sebabnya begitu banyak negara memilih untuk menerapkannya. Adanya pemilihan umum adalah ciri terpenting dari sebuah bangsa yang demokratis. Pemilu adalah faktor penting dalam mengubah dinamika politik, termasuk pola dan arah kebijakan publik serta siklus perubahan elit, meskipun mereka bukan satu-satunya komponen dalam pengaturan demokrasi. Pemilu dilaksanakan di Indonesia sebagai cara untuk mengumpulkan tujuan sosial yang sebelumnya telah diungkapkan partai politik terkait dengan tugasnya masing-masing. Ini berfungsi sebagai perwujudan nyata dari sistem demokrasi. Pemilu tidak hanya menjadi alat untuk menentukan kebijakan dan perwakilan politik, tetapi juga sebagai sarana untuk mengagregasi beragam pandangan dan keinginan masyarakat, memperlihatkan esensi demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik (Solihah et al., 2018).

Partisipasi politik masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi serta sistem politik yang berlaku di negara tersebut. Masyarakat Indonesia sekarang memiliki hak yang lebih besar untuk memilih pemimpin dan partai politik secara langsung. Partisipasi politik masyarakat di Indonesia saat ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pemilihan umum, aksi demonstrasi, partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil, hingga keterlibatan dalam diskusi dan kegiatan online. Media sosial dan kemajuan teknologi juga telah

memberi orang-orang forum baru untuk menyuarakan pemikiran mereka dan mendukung tujuan politik (Liando, 2016). Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan pada Pemilu dapat tercermin dari seberapa banyak individu yang memilih untuk golput. Golput, atau tidak memberikan suara, juga dapat diartikan sebagai sikap apatis atau acuh terhadap partisipasi dalam pemilihan pemimpin atau wakil rakyat. Sikap acuh ini muncul karena kondisi psikologis masyarakat yang, meskipun secara tradisional turut serta dalam setiap Pemilu, merasa bahwa hasil dari proses tersebut tidak membawa perbaikan signifikan terhadap nasib mereka. Pemilu berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu negara telah mengadopsi sistem demokrasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa suatu bangsa dikatakan telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi ketika memungkinkan rakyatnya untuk secara bebas memilih pemimpin dan perwakilan parlemen mereka.

Berdasarkan hal tersebut, demokrasi yang diwujudkan melalui Pemilu menuntut partisipasi aktif warga dalam memberikan suara. Tanpa keterlibatan masyarakat, Pemilu hanya akan menjadi serangkaian formalitas demokrasi. Dalam kerangka negara demokratis, keterlibatan warga dalam pemilu sering menjadi topik diskusi sentral. Ini terkait erat dengan validitas hasil pemilu karena mereka mengidentifikasi orang-orang yang telah dipilih pemilih untuk mengisi peran tertentu. Selain itu, partisipasi pemilih terkait dengan tingkat kepercayaan yang dimiliki rakyat terhadap demokrasi karena

pemilu dipandang sebagai cara bagi mereka untuk melaksanakan kehendak rakyat dan mewakili kepentingan mereka di legislatif (Mulyadi, 2019).

Di Indonesia, pengawasan terhadap pemilu telah diatur dalam suatu kerangka hukum yang kuat dan komprehensif. Kerangka legislasi utama yang mengatur ciri-ciri umum pelaksanaan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Termasuk peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memantau proses pemilu. Prosedur pemantauan internal dipercayakan kepada KPU untuk mengawasi perilaku anggota yang dapat melanggar hukum lokal dan nasional. Di sisi lain, Bawaslu bertugas mengawasi setiap fase proses pemilu, baik lokal maupun nasional. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu, memberikan sanksi kepada pelanggar, dan mengambil tindakan hukum apabila terdapat bukti yang kuat terkait pelanggaran pemilu (Majid et al., 2023).

Memisahkan pemilihan umum untuk cabang legislatif dari pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum yang sejalan dengan konstitusi. Peraturan UU Pemilu tentang kerukunan penyelenggaraan pemilu diartikan bahwa proses pemilihan umum akan mencakup pemilihan wakil rakyat pusat, seperti presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR dan DPD. Meskipun merupakan undang-undang pemilu yang paling komprehensif yang pernah ada, Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap memiliki beberapa kekurangan. Undang-Undang ini dianggap kurang visioner karena tidak mengatur secara menyeluruh tentang sistem pemilu, sehingga tidak memberikan gambaran jelas mengenai sistem politik demokrasi yang ingin dibangun dan dijaga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap tidak sistematis, mengandung duplikasi, dan terdapat kekacauan hukum (Maida & Ventyrina, 2022).

Istilah Pemilu tidak lagi terbatas pada pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Presiden/Wakil Presiden seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Sekarang, Pemilu juga mencakup Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), sebagaimana terlihat dalam variasi pemilu serentak 2, 3, 4, dan 5. Perbedaan ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan pemahaman Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang secara limitatif mengartikan pemilihan umum berlandaskan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD setiap 5 tahun sekali. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perluasan makna Pemilu yang mencakup Pilkada (Gubernur, Bupati/Walikota) adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak mempunyai otoritas untuk mengadili sengketa Pilkada, berdasarkan amanat Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Asmara, 2022).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki signifikansi yang besar pada konteks pemerintahan lokal karena mencerminkan esensi demokrasi yang berbasis pada partisipasi warga dalam menentukan kepemimpinan daerah mereka. Pertama-tama, Pilkada memberikan kesempatan bagi warga untuk secara langsung berpartisipasi dalam proses demokratis. Dengan memberikan hak suara kepada warga, Pilkada mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan kepemimpinan daerah ditentukan oleh suara mayoritas. Ini menciptakan rasa keterlibatan aktif dan tanggung jawab dalam masyarakat terhadap pembentukan pemerintahan setempat. Pilkada memberikan ruang bagi pluralisme dan representasi. Komunitas dapat memilih pemimpin melalui proses ini yang mencerminkan kelompok dan kepentingan yang berbeda di dalam komunitas. Melalui Pilkada, keberagaman dan dinamika sosial-politik dalam suatu daerah dapat tercermin dalam pilihan pemimpin yang dihasilkan. Hal ini memastikan adanya representasi yang lebih inklusif dan adil dalam pemerintahan lokal. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemimpin daerah dalam beberapa kasus akan berdampak pada peraturan atau kebijakan daerah yang berkaitan dengan nasib penyandang disabilitas. Pemimpin daerah ini dipilih melalui baik

pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Selain itu, penting bagi penyandang disabilitas untuk memahami hak-hak mereka saat memilih. Aksesibilitas dan layanan yang cocok untuk pemilih penyandang disabilitas termasuk dalam hak-hak ini, bersama dengan dukungan yang ditawarkan Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) sesuai dengan jenis gangguan tertentu. (Febriantanto, 2019).

KPU Sleman dalam PILKADA di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga penyelenggara Pilkada 2020 untuk memastikan kesuksesan dan peningkatan partisipasi pemilih pemula. Meskipun dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19, KPU berupaya menjalankan proses Pilkada secara ideal, terbuka, rahasia, jujur, dan adil. Sayangnya, data menunjukkan bahwa kaum muda tidak sepenuhnya menggunakan hak mereka untuk memilih dalam pemilihan kota karena jumlah pemilih yang buruk. Dari total 24.958 pemilih pemula yang terdaftar, hanya 5.989 yang memberikan suara, sementara 18.969 lainnya memilih untuk tidak memberikan suara, disebut sebagai golongan putih (Golput). Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran pemilu menjadi faktor penyebab, di mana banyak pemilih pemula belum sepenuhnya memahami hak pilihnya. Selain itu, jumlah partai politik dan calon yang ditawarkan juga menjadi kendala, menyulitkan identifikasi calon wakil rakyat yang diinginkan oleh pemilih pemula. Upaya perbaikan dalam meningkatkan pemahaman pemilih pemula dan memberikan

informasi yang jelas terkait partai politik dan calon dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini.

Pada tahun 2020, terjadi pemilihan daerah serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sleman. Dari 70.316 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 48.597 individu berpartisipasi dalam pemungutan suara, mewakili 69,1% dari populasi. Perlu disebutkan bahwa 21,9% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun jumlahnya masih relatif tinggi. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Dlingo, Pundong, dan Kecamatan Pleret memiliki tingkat partisipasi pemilih tertinggi di antara 17 kabupaten di Kabupaten Bantul, dengan jumlah pemilih mencapai 85% (Koesno, 2020). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada Kabupaten Bantul hanya sebesar 15%, masih jauh lebih rendah dibandingkan Sleman. Ada sejumlah alasan mengapa ada sedikit jumlah pemilih untuk pilkada ini. Ketidaktahuan publik tentang pentingnya pemilihan kepemimpinan lokal dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari merupakan faktor utama yang berkontribusi. Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah kurangnya informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai calon-calon yang bertarung dalam Pilkada. Meski demikian, tingkat partisipasi sebesar 69,1% mencerminkan tingginya minat sebagian besar masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi ini. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya Pilkada serta menyediakan

informasi yang mudah diakses dan transparan untuk membantu masyarakat membuat keputusan yang informasional dalam pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, terkait pemilihan bupati, dari 82 TPS menunjukkan pentingnya memahami tingkat partisipasi pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari data di atas, terdapat informasi terkait jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya pada setiap TPS, yang mencakup pemilihan antara Danang Wicaksana Sulistya, S.T - Raden Agus Choliq, S.E; M.M, Dra. Hj Sri Muslimatun, M.Kes - Amin Purnama, S.H, dan Dra. Hj Kustini Sri Purnomo - Danang Maharsa, SE. Rincian data meliputi jumlah pemilih per TPS dan persentase partisipasi pemilih. Hasil rekapitulasi suara yang diperoleh di Kalurahan Condongcatur adalah 17.819 suara sah dalam pemilihan Bupati Sleman. Masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan kalurahan lain seperti kalurahan Caturtunggal yang memperoleh suara sah sebanyak 19.025 suara. Analisis lebih lanjut mengenai pola partisipasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait faktor-faktor yang memengaruhi keaktifan pemilih di suatu wilayah. Faktor seperti pendidikan, aksesibilitas, dan kesadaran politik masyarakat setempat dapat menjadi pertimbangan dalam menjelaskan pola partisipasi tersebut. Penelitian lebih lanjut terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Condongcatur dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pemilihan bupati di wilayah

tersebut. Dengan cara ini, analisis data tentang partisipasi karyawan di setiap TPS dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi karyawan dan memahami preferensi karyawan di wilayah yang relevan (Arisonatalia & Tjahjoko, 2022).

Di antara berbagai alasan rendahnya partisipasi publik adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya perhatian masyarakat, dan jumlah pemilih yang tidak sebanyak pada pileg. Mereka yang tiba-tiba berhak memilih untuk pertama kalinya, yang dikenal sebagai pemilih pemula, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik lokal. Apakah mereka terdaftar sebagai mahasiswa, pelajar, atau pemilih berusia antara 17 dan 21 tahun, pemilih pemula membentuk demografis yang sangat unik, seringkali tidak terduga, dan tidak diragukan lagi penuh harapan. Mereka disebut sebagai pemilih unik karena mereka sangat antusias, relatif, dan rasional, dan haus akan perubahan. Pemilih muda sangat mempengaruhi hasil pemilu karena mereka adalah generasi yang aktif menggunakan teknologi dan menggunakan sosial media. Oleh karena itu, pemilih muda sangat mempengaruhi hasil pemilu di era digital saat ini. (Pitria, Utari, Marseta, Sari, & Pangestu, 2023)

Namun, seringkali partisipasi politik pemilih pemula cenderung rendah, dan ini mungkin mempengaruhi hasil dari pemilihan kepala daerah dan akhirnya arah kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong dan menghalangi pemilih pertama kali untuk terlibat

dalam proses politik. Penelitian mengenai topik ini diperlukan untuk memastikan modus keterlibatan politik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati Sleman 2020. Penelitian akan dilakukan di Desa Condongcatur Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok. Desa Condongcatur di Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok akan menjadi lokasi penelitian. Materi tersebut di atas telah membangkitkan minat penulis untuk meneliti “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Sleman tahun 2020 (Studi Kasus: Masyarakat Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman).”

## **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Sleman tahun 2020 di Masyarakat Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Sleman tahun 2020 di Masyarakat Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan utama penelitian :

1. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis keterlibatan politik yang akan ditampilkan oleh pemilih pemula di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020.
2. Memahami unsur-unsur yang mempengaruhi keterlibatan politik pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Sleman 2020, khususnya di lingkungan Desa Condongcatur, Kecamatan Depok.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis serta praktis yang akan dihasilkan oleh kegiatan penelitian yang direncanakan termasuk dalam manfaat penelitian.

1. Manfaat kegiatan penelitian dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang diterapkan dikenal sebagai manfaat teoritis
  - a. Hal-hal lain diharapkan dapat membantu untuk digunakan sebagai referensi untuk penulisan di masa depan untuk melengkapi apa yang telah diajarkan di pendidikan tinggi dan untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman penulis sendiri..

- b. Studi ini menunjukkan partisipasi pemilih pemula, yang akan memungkinkan KPU Sleman, serta stakeholder terkait untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula.
2. Keuntungan dari kegiatan penelitian yang dapat menawarkan saran untuk penelitian tambahan atau pembuat kebijakan mengenai topik penelitian yang dibahas dikenal sebagai manfaat praktis. Temuan penelitian ini diperkirakan akan berdampak signifikan dalam mendorong pemilih pertama kali di daerah pedesaan untuk berpartisipasi dalam politik dan mendukung masyarakat yang lebih demokratis. Ini sangat penting pada saat semakin banyak laporan menunjukkan bahwa orang Indonesia memiliki tingkat kepercayaan dan keterlibatan yang sangat rendah dalam sistem politik.

### 1.5. Tinjauan Pustaka

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan	Link
1	Aditya Yoga Prakosa, Kushandajani, Neny Marlina, (2020)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Bora Tahun 2020.	Menurut penelitian ini, sosialisasi merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Kabupaten Bora 2020. Kedua, keadaan epidemi COVID-19 saat itu. Ketiga, pemilih	<a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/36202">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/36202</a>

			pertama kali berpikir pragmatis dan tidak logis	
2	Primandha Sukma Nur Wardhani, (2018)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai cara pemilih muda berpartisipasi dalam politik selama pemilu, serta unsur-unsur yang mendorong dan menghambat aktivitas politik mereka. Pendekatan penulisan yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah tinjauan pustaka yang didukung oleh temuan penelitian terkait. Dengan membagi waktu mereka antara belajar dan terlibat dalam politik, pemilih muda harus lebih aktif terlibat dalam proses politik	<a href="https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1002992">https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1002992</a>
3	Sakir, Suranto, Awang Darumurti, Tunjung Sulaksono (2016)	Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Bantul	Mengumpulkan data dengan menggunakan teknik kualitatif, seperti studi dokumentasi, FGD (Focused Group Discussion) serta wawancara menggunakan (Snowball Method). Secara umum, justru	<a href="https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/269/Seminar%20Pilkada%20sementak.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/269/Seminar%20Pilkada%20sementak.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y</a>

			meningkatkan partisipasi di Kabupaten Bantul karena gagasan kesadaran politik yang tidak akurat di dalam penduduk (karena mereka memandang pemungutan suara sebagai kewajiban). Kesetiaan politik orang terdekat dapat berdampak pada seberapa banyak mereka berpartisipasi dalam komunitas.	
4	David Milanto Pau Gere (2018)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Di Kota Kupang	Keterlibatan pemilih muda untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang masih rendah. Ini adalah akibat dari mudarnya kepercayaan pemilih muda terhadap pemerintah, yang berdampak negatif pada keterlibatan politik mereka. Selain itu, kaum muda lebih suka mengejar minatnya daripada berpartisipasi dalam politik karena jadwal sibukan sehari-	<a href="http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11483">http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11483</a>

			hari mereka. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 di Kota Kupang, Komisi Pemilihan Umum bekerja untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih muda; Saat ini, tingkat partisipasi politik pemilih muda tidak berubah.	
5	Yulisa Inara (2020)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah	Pemilih muda terus berpartisipasi dalam tingkat pendidikan politik, sosialisasi, dan aktivitas kampanye yang relatif rendah. Keterlibatan politik pemilih muda di Kabupaten Selat dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal. Penulis menyarankan untuk melakukan penilaian dan memperkenalkan inisiatif baru untuk meningkatkan keterlibatan politik pemilih muda.	<a href="http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14558">http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14558</a>
6	Eta Yuni Lestari,	Partisipasi Politik Pemilih	Temuan penelitian menunjukkan bahwa	<a href="https://journal.unnes.ac.id/nju">https://journal.unnes.ac.id/nju</a>

	Nugraheni Arumsari (2018)	Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang	pemilih yang tidak berpengalaman tidak memiliki persiapan khusus dan tidak sepenuhnya siap untuk membuat keputusan. Keputusan pemilih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk visi dan misi kandidat jika terpilih, latar belakang pendidikan mereka, keyakinan agama mereka, kedudukan sosial atau kedekatan mereka dengan masyarakat, kinerja masa lalu mereka sebagai walikota (jika mereka petahana), riwayat pekerjaan mereka, dan karakter mereka (kejujuran, ketergantungan, populisme, dan tidak pernah memiliki masalah hukum).	<a href="#">/index.php/inte gralistik/article /view/14602/7 844</a>
7	Wisnu Dani Prasetyo, Toni Harsan, Pujiyana Pujiyana (2019)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan	Temuan penelitian mengarah pada kesimpulan sebagai berikut: 1) Pemilih di Kecamatan Sumber memiliki tingkat	<a href="https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/cessj/article/view/360">https://journal. univetbantara.a c.id/index.php/ cessj/article/vi ew/360</a>

		Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta	partisipasi politik yang tinggi karena mereka sangat antusias dalam menggunakan hak pilihnya. 2) Sejumlah faktor, termasuk pengaruh orang tua, kondisi lingkungan, pengalaman organisasi, dan modernisasi, mempengaruhi partisipasi politik pemilih pertama kali di Kecamatan Sumber. 3) Kegiatan pemilu, kampanye, lobi, kegiatan organisasi, kontak, dan tindakan kekerasan adalah beberapa bentuk partisipasi politik yang berdampak pada pemilih pertama kali di Kecamatan Sumber.	
8	Hatta Azzuhri, Tiara Ningsih, Yustika Oktora Domas (2022)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan	Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan politik di kalangan pemilih muda di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, secara signifikan lebih rendah	<a href="https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/12692/554">https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/12692/554</a> 4

			dibandingkan desa-desa lain di kabupaten tersebut. Kantor Kecamatan Sukamerindu di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, merilis angka rekapitulasi yang menunjukkan bahwa hanya 28 pemilih muda, atau 40% dari total, yang berpartisipasi dalam pemilu 2018 di Desa Sukaraja.	
9	Ali Ismail Shaleh, Raihana Raihana, (2021)	Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era COVID-19 Di Indonesia	Hingga 9 Desember 2020, temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemilih muda dalam Pilkada 2020 akan jauh lebih penting. Urgensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia harus memastikan keselamatan pemilih remaja di tengah wabah Covid-19 juga ditekankan. Kesimpulan studi ini menyoroti perlunya lembaga pemerintah bekerja sama di tingkat nasional dan lokal untuk mempertahankan	<a href="https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAISS/article/view/508/pdf">https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAISS/article/view/508/pdf</a>

			keterlibatan publik selama pandemi COVID-19, terutama di kalangan pemilih muda.	
10	Tri Eva Juniasih (2018)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan	Menurut temuan penelitian, Pemula Sangat Antusias dapat berpartisipasi dalam Legislatif Summun 2014 dengan menggunakan Hak Pilih. Persentase adopsi undang-undang asli pada tahun 2014 yang menggunakan Hak Pilihnya adalah 94,3%.	<a href="https://www.researchgate.net/publication/336562510_Partisipasi_Politik_Pemilih_Pemula_Dalam_Pemilihan_Umum_Legislatif_Tahun_2014_Di_Kelurahan_Panyanggar_Kecamatan_Padangsidimpuan_Utara_Kota_Padangsidimpuan">https://www.researchgate.net/publication/336562510_Partisipasi_Politik_Pemilih_Pemula_Dalam_Pemilihan_Umum_Legislatif_Tahun_2014_Di_Kelurahan_Panyanggar_Kecamatan_Padangsidimpuan_Utara_Kota_Padangsidimpuan</a>

Sumber : diolah oleh penulis, 2023

Menurut analisis tinjauan pustaka yang diberikan di atas, belum ada penelitian yang dilakukan tentang keterlibatan politik pemilih pemula dalam pemilihan kabupaten Sleman, terutama di wilayah Condongcatu. Untuk alasan ini, bagian diskusi penelitian akan melihat lebih dekat masalah ini. Selain itu, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Kapuas, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kupang, dan Kabupaten Blora adalah satu-satunya

tempat penelitian sebelumnya tentang keterlibatan politik pemilih pemula telah dilakukan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis yang lebih menyeluruh tentang keterlibatan politik pemilih pertama kali dalam Pilkada Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Desa Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

## **1.6. Kerangka Teori**

Saat melakukan penelitian, Peneliti harus menggunakan teori-teori berikut sebagai dasar untuk memperkuat argumen atau indikator penelitian.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori-teori berikut.

### **1.6.1. Partisipasi Politik**

Menurut Surbakti (Qodir, 2016) Salah satu komponen utama demokrasi adalah partisipasi. Menurut asumsi yang mendasari partisipasi dan demokrasi, orang yang paling tahu apa yang baik untuk diri mereka sendiri adalah orang itu. Karena kehidupan warga negara dipengaruhi oleh keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Rush dan Althoff (Qodir, 2016) partisipasi politik ialah keterlibatan individu di berbagai tingkatan dalam sistem politik. Di sisi lain, Budiardjo (Qodir, 2016) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas individu atau sekelompok orang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, termasuk memilih pemimpin nasional serta

mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) secara langsung atau tidak langsung. Terdapat bentuk-bentuk dalam partisipasi politik menurut (Qodir, 2016) yang terjadi di masyarakat dimana sebagai berikut :

1. Tahap Pra Pemilihan, dimana pada tahap ini berupa adanya sebuah persiapan awal yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan juga pemfokusan dalam memberikan ilmu terkait pemilihan kepala daerah nantinya akan dilaksanakan. Adapun bentuk yang dilakukan biasanya berupa :

- a. Partisipasi dalam sosialisasi pilkada.
- b. Mengetahui para calon kepala daerah.
- c. Mengetahui program para kepala daerah.
- d. Mengetahui visi serta misi para calon kepala daerah.
- e. Mengetahui kegiatan kampanye para calon kepala daerah.

2. Tahap Pemilihan, dimana pada tahapan ini para pemilih memiliki peran secara langsung dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah berupa mendatangi lokasi TPS dan masuk kedalam ruangan yang sudah ditentukan untuk melakukan giliran dalam memilih. Adapun bentuk tindakan yang dilakukan berupa :

- a. Memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah.
- b. Kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

3. Pasca Pemilihan, dimana bentuk tindakan yang dilakukan dengan mengetahui hasil maupun bentuk akhir dari kegiatan yang dilanjutkan dengan perhitungan suara dalam pemilihan kepala daerah dan mengetahui kandidat mana yang nantinya akan keluar sebagai pemenang dengan voting tertinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya.

#### **1.6.2. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Umumnya, partisipasi politik individu atau kelompok dalam sistem politik dipengaruhi oleh: (Subakti, 2018):

##### **1) Pendidikan**

Keterlibatan dan perilaku individu dalam politik sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Orang yang berpendidikan tinggi lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam politik daripada orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, menurut penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Lipset. Bidang studi atau jurusan dapat berdampak pada tingkat partisipasi politik selain sekolah. Dinyatakan secara berbeda, mereka yang memiliki latar belakang ilmu sosial atau politik seringkali lebih mungkin untuk terlibat dalam proses politik daripada orang-orang dengan latar belakang di domain lain seperti ilmu alam.

##### **2) Jenis Kelamin dan Status Sosial**

Jenis kelamin dan status sosial seseorang berdampak pada keterlibatan politik mereka. Karl W. Deutsch menemukan bahwa di Amerika, sepertiga dari penduduk dengan pendapatan dan status

tertinggi berpartisipasi dalam lebih banyak kegiatan daripada sepertiga individu dengan pendapatan dan status terendah. Selain itu, Lipsel menemukan bahwa pria lebih terlibat daripada wanita dalam masyarakat Amerika.

### 3) Sumber Informasi

Pengaruh terhadap partisipasi politik publik, termasuk pemilih pemula, dipengaruhi oleh hubungan antara sumber informasi, termasuk masyarakat di masyarakat, tetangga, media massa, partai politik, dan teman. Ada kecenderungan bahwa semakin dapat diandalkan sumber informasi yang diakses oleh pemilih, semakin besar pengaruh masing-masing sumber informasi terhadap partisipasi politik mereka. Sebaliknya, semakin tidak dapat diandalkan sumber informasi yang diakses oleh pemilih, semakin lemah pengaruh masing-masing sumber informasi terhadap partisipasi politik mereka.

### 4) Kesadaran Politik

Pengetahuan, minat, dan kepedulian individu terhadap lingkungan sosial dan politik disebut sebagai kesadaran politik. Tanda bahwa suatu komunitas memperhatikan keprihatinan kenegaraan dan pembangunan diakui sebagai tingkat kesadaran politik.

### 5) Lingkungan

Faktor lingkungan mencakup keseluruhan ruang bersama dengan semua objek, gaya, kondisi, dan makhluk hidup yang memfasilitasi berbagai aktivitas interaksi sosial di antara berbagai kelompok dan institusi. Lembaga pertama yang dilihat oleh seorang

individu adalah keluarganya. Keluarga adalah tempat pertama karakter dan keyakinan seseorang dibentuk, yang dapat mempengaruhi dan menentukan keyakinan mereka tentang politik. Sebaliknya, teman-teman yang akrab juga dapat mempengaruhi keyakinan politik seseorang. Apabila masalah politik menarik perhatian seseorang, mereka akan tertarik padanya. Dalam hal ini, seseorang mengubah kepentingannya dan berperilaku sehingga mereka dapat sesuai dengan kelompoknya. Ini juga bertujuan untuk membuat individu diterima oleh anggota kelompok.

6) Ideologi (Dampak kelompok kepentingan dan partai politik terhadap komunikasi dan sosialisasi politik)

Jumlah partisipasi politik dalam suatu masyarakat secara signifikan dipengaruhi oleh keyakinan yang ditanamkan oleh partai politik pada pendukungnya. Secara umum, partai komunis, organisasi pemuda, organisasi budaya, dan organisasi buruh mengontrol dan mendorong keterlibatan politik warga negara di negara-negara komunis. Ini dilakukan untuk membantu transformasi masyarakat dan pembentukan masyarakat komunis. Keterlibatan politik meluas di Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya sebagai hasil dari komunikasi dan sosialisasi politik yang dikendalikan dan diatur; Namun demikian, partisipasi ini lebih signifikan ketika mengambil bentuk pemaksaan atau mobilitas. Karl W Deutsch menganalisis partisipasi politik individu dalam pemilihan presiden Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1968. Hasilnya menunjukkan bahwa

partisipasi di Uni Soviet jauh lebih tinggi (96%) daripada di Amerika Serikat (62%).

Budiardjo (2018) mengidentifikasi empat variabel yang mempengaruhi keterlibatan politik:

a) Faktor sosial ekonomi

Usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, pendapatan, dan tingkat pendidikan seseorang semuanya diperhitungkan ketika menentukan posisi sosial ekonomi mereka.

b) Faktor politik

Tujuan menghasilkan barang akhir memotivasi keterlibatan politik. Di antara faktor politik adalah:

a. Komunikasi politik.

Memahami dan mengevaluasi bagaimana komunikasi memengaruhi proses politik, opini publik, dan pengambilan keputusan politik adalah subjek komunikasi politik, subbidang lain dari penelitian komunikasi. Ini memerlukan penelitian cara-cara di mana sinyal politik tentang otoritas, pemerintahan, dan tindakan politik di dalam sistem politik diekspresikan, ditemukan, atau dihubungkan.

b. Kesadaran politik.

Komunikasi politik adalah bidang lain dari penelitian komunikasi yang berfokus pada pemahaman dan penilaian bagaimana komunikasi memengaruhi opini publik, proses politik, dan pengambilan keputusan politik. Ini berarti mempelajari ekspresi,

penemuan, dan/atau hubungan sinyal politik tentang otoritas, pemerintahan, dan tindakan politik di dalam sistem politik.

c. Pengetahuan masyarakat kepada tahap-tahap pengambilan keputusan.

Pengetahuan masyarakat tentang proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan jalan ke mana keputusan akan dibuat.

d. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.

Komunikasi politik adalah subbidang penelitian komunikasi yang berfokus pada pemahaman dan penilaian cara-cara komunikasi memengaruhi opini publik, pengambilan keputusan politik, dan proses politik. Menyelidiki ekspresi, penemuan, dan hubungan sinyal politik mengenai otoritas, pemerintahan, dan tindakan politik di dalam sistem politik diperlukan untuk mencapai hal ini.

7) Faktor fisik individu dan lingkungan

Karakteristik fisik pribadi dan lingkungan

Elemen fisik spesifik yang berfungsi sebagai sumber kehidupan termasuk infrastruktur dan aksesibilitas layanan publik. Kesatuan ruang dan semua benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup dianggap sebagai unsur lingkungan. Dalam faktor-faktor inilah kelompok yang berbeda terlibat dalam interaksi sosial, serta di dalam institusi dan sistem mereka.

8) Faktor nilai budaya

Sumber dasar demokrasi adalah nilai budaya politik, juga dikenal sebagai budaya masyarakat. Nilai-nilai ini berkaitan dengan etika politik, teknik, dan peradaban masyarakat, serta persepsi, pengetahuan, sikap, serta kepercayaan politik.

### 1.6.3. Pemilih Pemula

Pemilih didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, atau yang telah menikah, menurut Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Selain itu, Pasal 19 Ayat 1 dan 2 undang-undang yang sama menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun pada hari pemilihan dan yang terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih yang dikelola oleh penyelenggara pemilu diperbolehkan memberikan suara. Akibatnya, mereka ingin menghindari situasi buruk.

Pemilih pemula adalah mereka yang menggunakan hak mereka untuk memilih untuk pertama kalinya; Mereka adalah anggota komunitas yang telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Untuk memberikan suara, seseorang harus memenuhi kualifikasi, yang meliputi :

1. Umur sudah 17 tahun
2. Sudah / pernah kawin; dan
3. Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian.

Sangat penting bahwa pemilih pemula, terutama mereka yang berusia di bawah 17 tahun, memahami proses pemilihan. Mengingat bahwa suara mereka dapat memilih pemerintahan berikutnya dan meningkatkan kesejahteraan negara, Komisi Pemilihan Umum dan partai-partai terkait lainnya harus dapat memberikan gagasan yang jelas kepada pemilih tentang betapa pentingnya suara mereka dalam pemilihan. Pengetahuan ini diyakini akan mendorong pemilih untuk

terus memberikan suara yang terinformasi. Karena mereka juga memiliki dampak yang signifikan, kebijakan strategis diperlukan untuk membantu pemilih pertama kali lainnya dalam memberikan suara mereka. Kecuali mereka menikah, sebagian besar pemilih pertama kali berusia antara 17 dan 21 tahun. Kebanyakan dari mereka adalah lulusan baru, mahasiswa, atau karyawan muda, dan mereka memiliki banyak potensi untuk memengaruhi hasil pemilihan. Terutama dalam pemilihan umum, pemilih muda biasanya lesu dan acuh tak acuh, tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya, cenderung mengikuti rekan-rekan mereka, dan tidak tahu tentang proses politik.

Mereka biasanya tidak pergi terlalu jauh dari tempat nyaman mereka untuk belajar politik. Keluarga adalah tempat pertama orang belajar tentang politik. Keluarga adalah tempat mereka pertama kali belajar berdemokrasi. Lingkungan keluarga mereka memiliki dampak besar pada bagaimana mereka melihat segala sesuatu dalam hidup, termasuk pendidikan politik. Perilaku pemilih mungkin dipengaruhi oleh pengaruh orang tua karena keluarga dapat memiliki dampak emosional. Kedua, kelompok sebaya atau sesama siswa. Teman bermain atau teman sebaya mungkin berdampak pada pendidikan politik dan informasi. Teman sebaya dianggap berdampak pada sikap dan perilaku positif dan negatif. Oleh karena itu, kecenderungan politik mereka kemungkinan besar sama dengan teman-teman dekat mereka. Media berada di urutan ketiga. Remaja atau mereka yang

memilih untuk pertama kalinya dapat menghabiskan waktu berjam- jam menonton televisi dalam sehari karena media massa, terutama televisi, adalah cara yang efisien untuk mencerahkan audiensnya tentang politik. Namun, mereka mungkin tidak selalu menonton program politik. Pada kenyataannya, pemahaman politik pemilih pertama kali identik dengan kategori pemilih lainnya. Studi perilaku pemilih menunjukkan bahwa masih ada hubungan erat antara unsur sosial dan psikologis dengan bagaimana orang membuat penilaian politik. Pemilih pertama kali berbeda dari kelompok lain karena mereka memiliki pengalaman politik dengan pemilu. Informasi atau preferensi yang memengaruhi keputusan mereka seringkali tidak menentu atau dapat berubah secara tiba-tiba. Tidak pantas bagi pemilih baru untuk menyerah pada preferensi politik mereka hanya berdasarkan popularitas. Ini adalah masalah penting. Pemilih pertama kali memiliki kecenderungan untuk lebih bersimpati dengan kandidat populer daripada politisi non-selebriti.

Akibatnya, untuk menjamin bahwa pemilih baru berkembang menjadi pemikir kritis serta logis, semua konstituen serta individu yang berada di posisi otoritas harus memberi mereka pendidikan politik. Hubungan emosional, afinitas rasial, atau popularitas seharusnya tidak memengaruhi keputusan mereka. Sebaliknya, rekam jejak, visi, kredibilitas, dan pengalaman birokrasi harus sangat membebani.

#### 1.6.4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang juga disebut sebagai "Pilkada", menyatakan bahwa pemilu berfungsi sebagai wahana untuk menempatkan kedaulatan rakyat di provinsi, kabupaten, dan kota untuk digunakan dengan memilih wakilnya untuk menjabat secara langsung dan demokratis. Selain itu, pemilu berfungsi sebagai wahana untuk memberlakukan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila di provinsi, kabupaten, dan kota. Hak-hak dasar masyarakat lokal diambil melalui pemilihan langsung untuk menawarkan perekrutan lokal yang demokratis. Pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis berdasarkan cita-cita langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2015.

Proses dan prosedur pemilu masing-masing aktor atau komponen politik harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Dengan demikian, efektivitas penyelenggara pemilu berdampak besar pada hasil dan tata cara pemilu. Salah satu tanggung jawab utama penyelenggara adalah menyelenggarakan acara. Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam perannya sebagai penyelenggara pilkad, dituntut untuk bertindak bebas dan tidak melakukan intervensi. Sesuai peraturan pemilu, KPU adalah entitas otonom dan permanen yang menyelenggarakan pemilu nasional. Tanggung jawab dan

kewenangan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan undang-undang pemilu telah diberikan kepada KPU.

## **1.7. Definisi Konseptual dan Operasional**

### **1.7.1. Definisi Konseptual**

Adapun definisi konseptual dari penelitian ini ialah :

#### **1. Partisipasi Politik**

Menurut Surbakti (Qodir, 2016), partisipasi merupakan salah satu elemen kunci demokrasi, berdasarkan kerangka teoritis. Anggapan yang mendasari demokrasi dan partisipasi berpendapat bahwa individu yang tahu apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri adalah orang itu. Pemerintah membuat dan melaksanakan keputusan politik yang berdampak pada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Menurut Rush dan Althoff (Qodir, 2016), partisipasi politik adalah keterlibatan orang dalam sistem politik di berbagai tingkatan. Di sisi lain, keterlibatan politik, menurut Budiardjo (Qodir, 2016), adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, yang meliputi pemilihan pemimpin nasional dan memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan publik.

#### **2. Pemilih Pemula**

Pemilih pertama kali adalah mereka yang merupakan anggota komunitas yang memenuhi syarat untuk memilih tetapi menggunakan

hak mereka untuk memilih untuk pertama kalinya. Seseorang memenuhi syarat untuk dipilih jika mereka memenuhi kriteria berikut:

- 1) Umur sudah 17 tahun ;
  - 2) Sudah / pernah kawin; dan
  - 3) Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian.
3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilu merupakan cara untuk menempatkan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk dimanfaatkan dengan memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokratis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang juga dikenal dengan "Pilkada". Selain itu, pemilu berfungsi sebagai wahana untuk memberlakukan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila di provinsi, kabupaten, dan kota.

### 1.7.2. Definisi Operasional

Pengertian operasional penelitian ini adalah untuk mengukur partisipasi politik pemilih pertama kali dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020 di Kabupaten Sleman di antara warga Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, antara lain:

**Tabel 1. 2 Definisi Operasional**

Variabel	Indikator	Parameter
Bentuk Partisipasi Politik	Tahap Pra Pemilihan 1) Partisipasi dalam sosialisasi pilkada.	(Qodir, 2016)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Mengetahui para calon kepala daerah.</li> <li>3) Mengetahui program para kepala daerah.</li> <li>4) Mengetahui visi serta misi para calon kepala daerah.</li> <li>5) Mengetahui kegiatan kampanye para calon kepala daerah.</li> </ul> <p>Tahap Pemilihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah.</li> <li>2) Kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.</li> <li>3) Pasca Pemilihan yakni mengetahui kegiatan perhitungan suara dalam pilkada.</li> </ul>	
Faktor Pengaruh Partisipasi politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Faktor sosial ekonomi</li> <li>2) Faktor politik <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komunikasi politik.</li> <li>b. Kesadaran politik.</li> <li>c. Pengetahuan masyarakat kepada proses pengambilan keputusan.</li> <li>d. Kontrol masyarakat kepada kebijakan publik.</li> </ul> </li> <li>3) Faktor fisik individu serta lingkungan</li> <li>4) Faktor nilai budaya</li> </ul>	(Budiardjo, 2018)

### 1.8. Metode Penelitian

"*Metod*" mengacu pada teknik yang tepat untuk melakukan sesuatu, serta "*Logos*" adalah bahasa Yunani untuk sains atau pengetahuan. Kedua kata ini digabungkan untuk membentuk

metodologi penelitian. Akibatnya, teknik penelitian mengacu pada proses yang menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan (Narbuko, C., & Ahmadi, A. 2015). Menurut Bogdan dan Taylor (Lexy, M. J., 2007), metodologi kualitatif adalah jenis studi yang menghasilkan data deskriptif dari subjek penelitian dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku. Untuk memahami sepenuhnya Partisipasi Politik Pemilih Pertama Kali dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Sleman Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, peneliti harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap isu ini. Para peneliti perlu mencari tahu berapa banyak pemilih pertama kali memberikan suara di titik yang berbeda selama pemilihan dan mengapa mereka memilih kandidat yang mereka lakukan.

#### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Dengan menggunakan data yang dikumpulkan dalam lingkungan alami, penulis akan menggunakan analisis kualitatif sebagai pendekatan studi untuk mengekspos fenomena secara holistik dan kontekstual. Pendekatan ini merupakan instrumen utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif (Tanjung, B. N., & Ardial, 2005). Penelitian ialah proses yang berlarut-larut; ide, teori, dan konsep dikembangkan dari penelitian yang dimulai dengan keinginan seseorang untuk memahami fenomena tertentu (Tanjung, B. N., & Ardial, 2005). Penelitian jenis ini digunakan oleh penulis untuk

memberikan analisis menyeluruh tentang bentuk partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Bupati Sleman 2020 di masyarakat Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

### **1.8.2. Lokasi Penelitian**

Kajian dilakukan di Desa Condongcatur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

### **1.8.3. Jenis Data**

Menurut (Lexy, M. J, 2007) mendefinisikan data sebagai informasi atau spesifik yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Kata-kata dan perbuatan adalah data dasar, sedangkan dokumen dan sumber lain menyediakan data tambahan. Data primer dan sekunder keduanya akan digunakan dalam penelitian ini sebagai dokumentasi pendukung. Penjelasan tentang data primer dan sekunder disediakan di bawah ini:

#### **a. Data Primer**

Karena data primer belum diproses, data tersebut dikumpulkan oleh pihak pertama dan oleh karena itu cukup subjektif. Wawancara langsung dengan anggota masyarakat di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, serta pemilih pemula, akan dilakukan oleh peneliti. Penulis penelitian ini akan berbicara dengan berbagai orang yang telah berkontribusi pada materi pelajaran, yaitu;

1. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman.
2. Lurah Kalurahan Condongcatur.

3. Masyarakat Pemilih Pemula Dengan Usia 17 Tahun Kelurahan  
Condongcatur.

b. **Data Sekunder**

Informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh peneliti dari sumber luar disebut sebagai data sekunder. Biasanya berasal dari jurnal, notulen rapat, peraturan perundang-undangan, artikel, karangan ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian.

**1.8.4. Teknik Pengumpulan Data**

a. **Wawancara**

Peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data ketika mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang responden dan ukuran sampel yang kecil, atau ketika mereka ingin melakukan studi awal untuk mengungkap masalah yang memerlukan penyelidikan tambahan (Sugiyono, 2018). Untuk mendapatkan data yang orientik dan informatif, metode wawancara digunakan untuk melakukan wawancara tatap muka dengan individu yang diwawancarai. Tujuan wawancara ini adalah untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal-hal lain yang disampaikan oleh individu untuk mendapatkan lebih banyak data dan untuk memberikan klarifikasi atas hal-hal yang belum diketahui. *Purposive sampling* ialah teknik yang digunakan dalam penyelidikan ini. Tujuan dari pengambilan sampel yang disengaja, juga dikenal sebagai pengambilan sampel penghakiman, ialah untuk mengumpulkan

sampel representatif yang memenuhi standar yang telah ditentukan (Kerlinger & Lee, 2000). Pada penetapan ini, sample penelitian tidak dipilih secara random; sebaliknya, mereka menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian (Poerwandari, 2005). Karena itu, peneliti kemudian bertindak dengan menghubungi Lurah Condongcatur untuk mendapatkan informasi tentang pemilih usia 17 tahun yang baru pertama kali memilih dalam Pilkada Sleman tahun 2020. Peneliti kemudian memilih peserta untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami karakteristik dan variabel yang mempengaruhi keterlibatan pemilih pertama kali di Kalurahan Condongcatur.

**b. Dokumentasi**

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi selain metode wawancara. Kata "dokumentasi" berasal dari kata "materi tertulis". Peneliti memeriksa dokumen, buku, majalah, aturan, buku harian, notulen rapat, dan materi lainnya saat menggunakan pendekatan dokumentasi (Arikunto, S, 2013). Tujuan teknik dokumentasi adalah untuk menemukan relevansi sehingga analisis data dapat dimulai.

**Tabel 1. 3 Identifikasi Kebutuhan Data**

No.	Variabel	Kebutuhan Data	Jenis Data	Metode
1.	Pandangan terhadap Kepentingan partisipasi	a. Pandangan pemilih pemula terkait pemilu yang yang	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Masyarakat Pemilih Pemula Usia 17 Tahun

No.	Variabel	Kebutuhan Data	Jenis Data	Metode
		dipengaruhi kualitas demokrasi pemilih pemula b. Pendapat pemilih pemula untuk melaksanakan pemilu tepat waktu atau disaat pertama kali syarat usia sudah terpenuhi		Kalurahan Condongcatur pada Pilkada DIY tahun 2020
2.	Peran pemerintah daerah dan KPU	a. Upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah dan KPU setempat b. Penjelasan terkait informasi terkait sistematikan pelaksanaan dan pencoblosan dijalankan	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Komisioner KPU Sleman 2. Pemerintah setempat (Lurah Kalurahan Condongcatur)
3.	Metode Sosialisasi Pemilu	a. Pengenalan yang sudah dijalankan	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Komisioner KPU Sleman

No.	Variabel	Kebutuhan Data	Jenis Data	Metode
		<p>terkait politik kepada masyarakat sudah sesuai aturan.</p> <p>b. Data kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan perangkat daerah setempat</p>		2. Pemerintah setempat (Lurah Kalurahan Condongcatur)
4.	Faktor Mempengaruhi Tingkat Motivasi Pemilih Pemula	<p>a. Pendapat terkait hal apa saja yang membuat pemilih pemula lebih mudah mengetahui informasi terkait pemilu</p> <p>b. Pendapat terkait hal apa saja yang membuat pemilih pemula mengenal lebih baik terkait sangan calon</p>	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Masyarakat Pemilih Pemula Usia 17 Tahun Kalurahan Condongcatur pada Pilkada DIY tahun 2020

No.	Variabel	Kebutuhan Data	Jenis Data	Metode
		c. Pandangan bagaimana media massa (online) yang digunakan sebagai media kampanye		

#### 1.8.5. Teknik Analisa Data

Analisis deskriptif kualitatif akan digunakan sebagai metode analisis data untuk penelitian ini. Pendekatan ini tergantung pada kapasitas peneliti untuk berpikir kritis untuk membuat hubungan yang diperlukan antara data dan fakta yang diperoleh dan pemahaman mereka tentang masalah dan kesulitan yang dihadapi masyarakat. Langkah-langkah berikut terlibat dalam penggunaan data hingga pengambilan keputusan, menurut Lexy, M. J. (2007):

- a. Mengumpulkan data atau informasi tentang masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat.
- b. Memeriksa data lapangan untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, didasarkan tujuan penelitian.
- c. Menyusun informasi yang akan diklarifikasi dari data yang telah dikumpulkan; Masukan ini diperoleh melalui sejumlah langkah,

- termasuk pengumpulan dan pemrosesan data, dan kualitas akhir dan keakuratan kesimpulan yang ditarik berpengaruh.
- d. Menafsirkan data sambil mendeskripsikan dan mengevaluasinya. Jenis informasi yang dapat ditampilkan dalam laporan studi menjadi penekanan utama dari analisis data.
  - e. Mengambil kesimpulan, ini adalah langkah terakhir dan memberikan informasi singkat tentang hasil penelitian.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kalurahan Condongcatur**

- a. Sejarah Kalurahan Condongcatur
- b. Pemukiman Condongcatur terletak di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Kata "condong", yang berarti "berkumpul", dan "catur", yang berarti "empat", digabungkan untuk membentuk nama Condongcatur. Empat desa Desa Manukan, Desa Gejayan, Desa Gorongan, dan Desa Kentungan digabungkan menjadi desa Condongcatur pada tahun 1946. Keempat desa ini kemudian digabungkan menjadi Condongcatur, sesuai peraturan pemerintah tahun 1946 yang mengatur administrasi desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Condongcatur didirikan sebagai desa pada tanggal 26 Desember 1946 (Condongcatur, 2017).